



PERSEBARAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ibrahim^{1*}, Ilham Zitri²

¹Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

*Email Koresponden: ibrahimali.geo@gmail.com

Diterima: 01-03-2023, Revisi: 17-05-2023, Disetujui: 11-06-2023

©2023 Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi

Abstrak Persebaran PDRB dapat berbeda di setiap wilayah, tergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang dimiliki. Persebaran PDRB di Sumbawa Barat menggambarkan kinerja ekonomi kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Data diperoleh menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB Sumbawa Barat mencapai 14,12 triliun rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 34,99%. PDRB per kapita di Sumbawa Barat pada tahun 2021 mencapai 27,4 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,95%. Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 9,15%. Secara geografis, kecamatan Taliwang menjadi daerah dengan kontribusi PDRB terbesar, yaitu sebesar 29,58%. Diikuti oleh Kecamatan Brang Rea sebesar 23,79%. Sementara itu, kontribusi terendah berasal dari Kecamatan Jereweh, yaitu sebesar 0,24%. Dalam beberapa tahun terakhir, Sumbawa Barat mengalami peningkatan kinerja ekonomi yang cukup signifikan. Peningkatan ini didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor andalan. Namun, masih diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini.

Kata kunci: Persebaran; PDRB; Kabupaten Sumbawa Barat

Abstract The distribution of GRDP may differ in each region, depending on geographical conditions, natural resources, and economic potential. The distribution of GRDP in West Sumbawa illustrates the district's economic performance. This research used descriptive qualitative approach with the determination of informants using snowball sampling technique. Data obtained using interviews, observation and documentation. Data analysis done through stages of data reduction, data display, drawing conclusions. The results of this research show West Sumbawa's GRDP reached 14.12 trillion rupiah, with the largest contribution coming from the agriculture, forestry and fisheries sectors, which amounted to 34.99%. GRDP per capita in West Sumbawa in 2021 will reach 27.4 million rupiahs, an increase compared to the previous year of 4.95%. The district's economic growth rate also experienced a significant increase, namely 9.15%. Geographically, the Taliwang sub-district is the area with the largest GRDP contribution, namely 29.58%. Followed by Brang Rea District with 23.79%. Meanwhile, the lowest contribution came from Jereweh District, which was 0.24%. In recent years, West Sumbawa has experienced a significant increase in economic performance. This increase was supported by the agriculture, forestry and fisheries sectors which were the mainstay sectors. However, efforts are still needed to develop other sectors so that they can make a greater contribution to economic growth in this district.

Keywords: Distribution; GRDP; West Sumbawa Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki beberapa tujuan, pertama untuk meningkatkan standar hidup (*level of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self esteem*) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta lembaga-lembaga yang mempromosikan martabat manusia dan rasa hormat. Ketiga, meningkatkan

kebebasan (*freedom/ democracy*) setiap orang dalam memilih berbagai variabel pilihan yang ada. Untuk itu, pembangunan harus meliputi segala bidang secara menyeluruh. Pembangunan yang dilakukan secara parsial akan sulit menyelesaikan permasalahan yang muncul bahkan dapat memperburuk permasalahan yang sudah ada serta memunculkan permasalahan baru (Kadarsih et al., 2020). Pembangunan yang hanya menitikberatkan pada satu aspek akan memicu terjadinya kegagalan pembangunan. Sumbawa Barat merupakan salah satu Kabupaten dari wilayah Nusa Tenggara Barat telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang (Nugraha et al., 2017). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Kabupaten Sumbawa Barat yang berkembang pesat yang dapat digunakan sebagai pembandingan dengan Sumbawa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Sumbawa Barat selama 5 tahun yaitu tahun 2018-2021 (Dito & Pujiastuti, 2021).

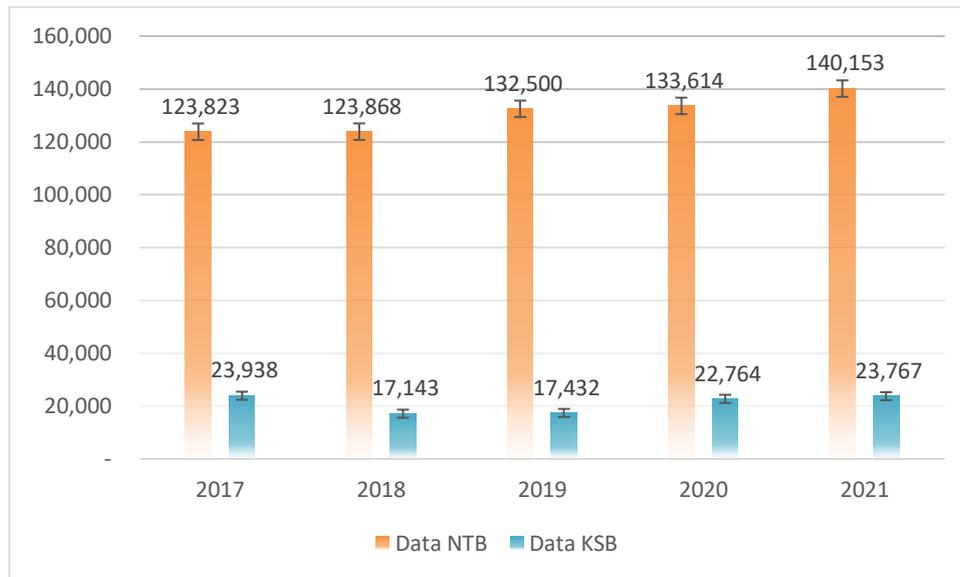
Berdasarkan data yang diperoleh, angka PDRB Per Kapita tertinggi adalah pada Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu Rp 17.143,40 pada tahun 2018 menjadi Rp23.767,39 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Siregar & Wahyuniarti, 2006). Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi (Octavia et al., 2017). Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan (Millis et al., 2006).

Persebaran PDRB Nasional menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan perekonomian nasional, diikuti oleh sektor jasa perdagangan, hotel, dan restoran. Namun, sektor pertanian juga tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Nasional. Persebaran PDRB dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau daerah, tergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, analisis terhadap persebaran PDRB suatu wilayah dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan (Karim & Setiawan, 2017).

Pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat, seperti pilihan untuk sehat, berpendidikan, dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan (Christine et al., 2019). Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masyarakat menjadi lebih buruk meskipun pendapatan per kapita melambung tinggi (Chaniago, 2014). Bank Dunia di bawah kepemimpinan Robert S Mc Namara tidak lagi hanya memberi perhatian pada mobilisasi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi negara-negara berkembang, tetapi juga menekankan pada tujuan-tujuan sosial, seperti memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak saja semata-mata untuk kemajuan ekonomi namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Miradj & Sumarno, 2014).

Ratih Sulistyastuti (2001) mengemukakan “bahwa pengembangan Usaha Kecil Menengah adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur” sehingga dengan banyaknya jumlah unit Usaha Kecil Menengah akan memunculkan industri-industri kecil yang baru serta memunculkan pengusaha-pengusaha yang baru yang akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Pemerintah secara nasional telah membuat berbagai macam strategi dengan merealisasikan suatu bentuk undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, dan menengah yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan mengatasi masalahnya. Kuncoro (2021) menyebutkan bahwa “usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga” pendapat mengenai usaha kecil menengah atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial

dari krisis ekonomi khususnya persoalan dalam meningkatkan jumlah unit usaha, pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat (Irawan et al., 2018).



Gambar 1. Data PDRB NTB Dan Kabupaten Sumbawa Barat 2017-2021
(Sumber. Analisis data Penelitian, 2022)

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1) Miskin Absolut, yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan; 2) Miskin Relatif, yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya; dan 3) Miskin Kultural, yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya ditandai adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing beserta peran serta dari pemerintah daerah yang mengaturnya. Adanya peran pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tiap daerah (Ardyan & Sudyasjayanti, 2020). Tingginya capaian PDRB pada tiap daerah merupakan suatu keberhasilan perekonomian daerah.

Penelitian yang dilakukan Kinasih (2011) berjudul “ Analisis Pengaruh Perkembangan UKM terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul 1994-2009 “ penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perkembangan industri UKM terhadap Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 1994-2009. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier ganda dengan metode OLS. menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan jumlah usaha dan pertumbuhn tenaga kerja industri UKM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, sementara variabel pertumbuhan total output industri UKM tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Secara bersama-sama, ketiga variabel independen tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul. Lalu Penelitian yang dilakukan Raselawati (2011), berjudul “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia. Pada penelitian ini digunakan metode data panel dengan fixed effect model. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDB UKM, Tenaga Kerja UKM, jumlah unit UKM, dan investasi UKM tahun 2000-2009. Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi panel

menunjukkan ekspor UKM, jumlah unit UKM, dan investasi UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM. Sedangkan variabel tenaga kerja UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor UKM karena Tenaga Kerja yang diserap tidak sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan Hapsari, dkk (2014) berjudul “pengaruh pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Ekonomi daerah (studi di pemerintah kota batu). Dari hasil pengujian regresi panel secara bersama-sama ditemukan bahwa Pemberdayaan UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu. Dan dari hasil pengujian secara parsial variabel jumlah UKM dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, sedangkan untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu.

PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB Per Kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah (Mahdalena et al., 2020). PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah (Todaro et al., 2018). BPS (2012), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dalam tingkat PDRB antara berbagai wilayah atau daerah. Tujuan ini dapat membantu mengidentifikasi daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat atau yang mengalami ketertinggalan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang lebih merata. Membantu perencanaan pembangunan regional serta dapat memberikan informasi penting untuk perencanaan pembangunan regional. Dengan memahami bagaimana PDRB didistribusikan di seluruh wilayah, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan investasi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang dengan baik dan sektor-sektor yang membutuhkan stimulus tambahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Hasanah et al., 2023). Sedangkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi jenis penelitian deskriptif kuantitatif (data yang dapat diukur) (Sugiono, 2014). Metode penelitian kualitatif menekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode *naturalistic*. Mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel atau instrumen sangat disarankan suatu situasi sosial didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.636,25 km² dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di NTB seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki populasi sekitar 200 ribu jiwa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan peternak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini, biasanya dalam satu tahun. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan (Nursan & Sukarne, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir (2017-2021) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp 8,36 triliun dan meningkat menjadi Rp 9,07 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp 9,53 triliun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 9,96 triliun. Sayangnya, data PDRB untuk tahun 2021 belum tersedia. Dilihat dari sektor-sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi andalan dengan kontribusi sekitar 28,4% pada tahun 2020. Sektor pertambangan dan penggalian juga berkontribusi cukup signifikan yaitu sekitar 27,9%. Sementara sektor jasa juga berkontribusi besar yaitu sekitar 27,4%. Perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat pada 5 tahun terakhir cukup signifikan. Berdasarkan data dari BPS, produksi padi pada tahun 2016 mencapai 200,83 ribu ton dan meningkat menjadi 222,59 ribu ton pada tahun 2020. Demikian juga dengan produksi jagung yang meningkat dari 13,66 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 15,79 ribu ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat.

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada 5 tahun terakhir. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang kaya akan sumber daya tambang seperti emas, tembaga, dan pasir besi. Produksi emas pada tahun 2016 sekitar 2.856 kg dan meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah. PDRB dapat memberikan gambaran tentang nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut. Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan jumlah penduduk, sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri dan pertambangan juga mulai berkembang di daerah ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 mencapai Rp 9,96 triliun. PDRB tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 9,53 triliun pada tahun 2019. Peningkatan PDRB ini terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian, yang menyumbang sekitar 45,69% dari total PDRB Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam upaya untuk meningkatkan PDRB di Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang sudah ada, serta menumbuhkan sektor-sektor baru yang potensial untuk dikembangkan. Pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas ke daerah ini, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Dengan demikian, diharapkan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat dapat terus meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut data BPS, pada tahun

2020, PDRB Kabupaten Sumbawa Barat mencapai angka Rp 9,96 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,1% dari tahun sebelumnya. Sektor terbesar yang berkontribusi pada PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,95%. Sektor ini menjadi sektor andalan di Kabupaten Sumbawa Barat karena wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor kedua terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 31,34% pada PDRB. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sumber daya mineral yang cukup besar seperti emas, tembaga, dan nikel. Kondisi ini membuat sektor pertambangan menjadi kontributor besar pada PDRB Kabupaten Sumbawa Barat. Sektor lainnya yang berkontribusi pada PDRB Kabupaten Sumbawa Barat adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 7,49%. Selain itu, sektor manufaktur dan pengolahan juga turut berkontribusi pada PDRB dengan kontribusi sebesar 6,64%.

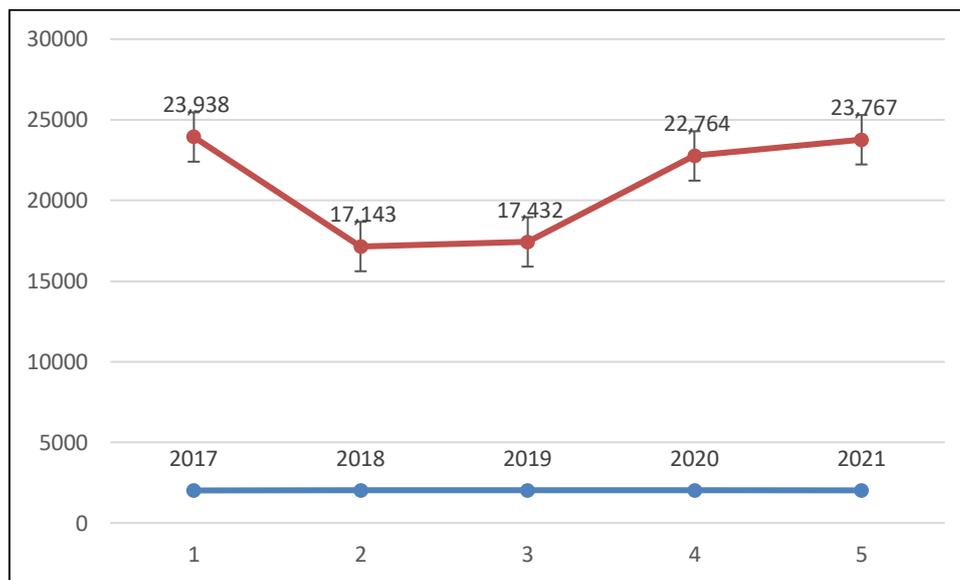
Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industry (Yamani, 2011). Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsector ("Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kesekretariatan PT Semen Padang," 2019). Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa Pemerintah provinsi NTB selalu berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dapat tumbuh dengan maksimal seperti provinsi-provinsi yang ada di Indonesia serta dapat menunjukkan progress yang baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB di wilayah atau daerah tersebut. Oleh sebab itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal pemerintah daerah khususnya di provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya telah dilakukan seperti pengambilan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan di provinsi NTB. Akan tetapi keingan pemerintah dalam mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selamanya berjalan dengan mudah setiap tahunnya. Karena disebabkan oleh keterbatasan anggaran modal dalam membangun infrastruktur yang ada di Provinsi NTB.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu meningkat hal tersebut juga akan berpengaruh pada pertumbuhan jumlah angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi. Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di

suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi. Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.



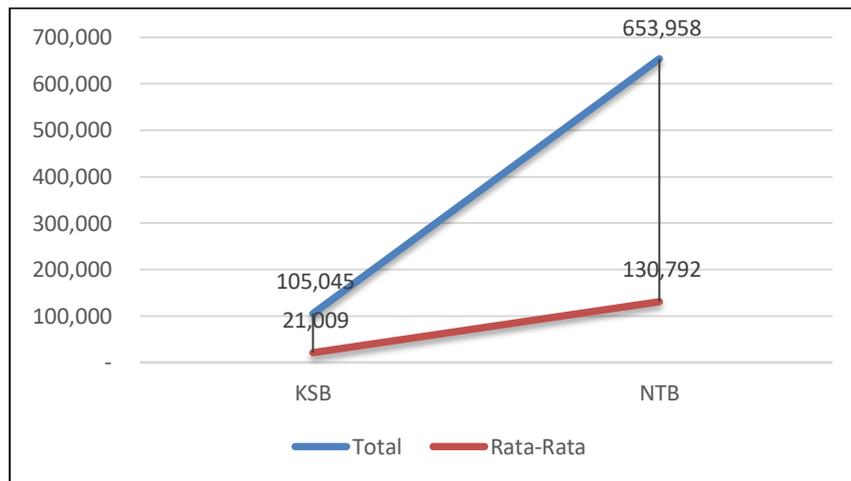
Gambar 2. Data PDRB Kabupaten Sumbawa Barat 2017-2021
(Sumber. Analisis Data Penelitian, 2022)

Berdasar kan gambar grafik diatas dapat terlihat bahwa pekerbangan jumlah angkatan kerja perkabupaten/kota di provinsi NTB tiap tahunnya relatif sama, akan tetapi di tahun terakhir yaitu ditahun 2016 perkembangan angkatan kerja mengalami kenaikan disetiap kabupaten/kota di provinsi NTB dan diikuti di tahun 2015 namun di tahun 2015 pertumbuhan angkatan kerja di kota Bima adalah terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di NTB. Tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 perkembangan angkatan kerja tidak terlalu mengalami tren atau kenaikan yang signifikan tetapi perkembangan yang hampir sama disetiap kabupaten/kota diprovinsi NTB. Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan kesempatan kerja yang masih terbatas.

Berikut adalah data PDRB Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS): Tahun 2017: Rp 8,36 triliun, Tahun 2018: Rp 9,07 triliun, Tahun 2019: Rp 9,53 triliun, Tahun 2020: Rp 9,96 triliun, Tahun 2021. Dari data tersebut, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor-sektor lainnya seperti industri dan pariwisata. Namun demikian, data untuk tahun 2021 belum tersedia karena masih dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Data untuk tahun tersebut akan menjadi penting untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat serta mengukur kinerja ekonomi daerah pada tahun tersebut. Data PDRB ini penting untuk membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam

merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan untuk daerah tersebut. Dengan memahami data PDRB, pemerintah dapat menentukan prioritas sektor yang perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur dan sistem perekonomian di daerah tersebut.

Belanja daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal yang bertujuan untuk membangun daerah dalam bentuk prasarana ekonomi dan sosial, yang secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan atau jumlah pengeluaran pemerintah daerah dapat diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk melihat realisasi belanja daerah perkabupaten/kota di NTB dapat di lihat di Gambar 3 berikut.

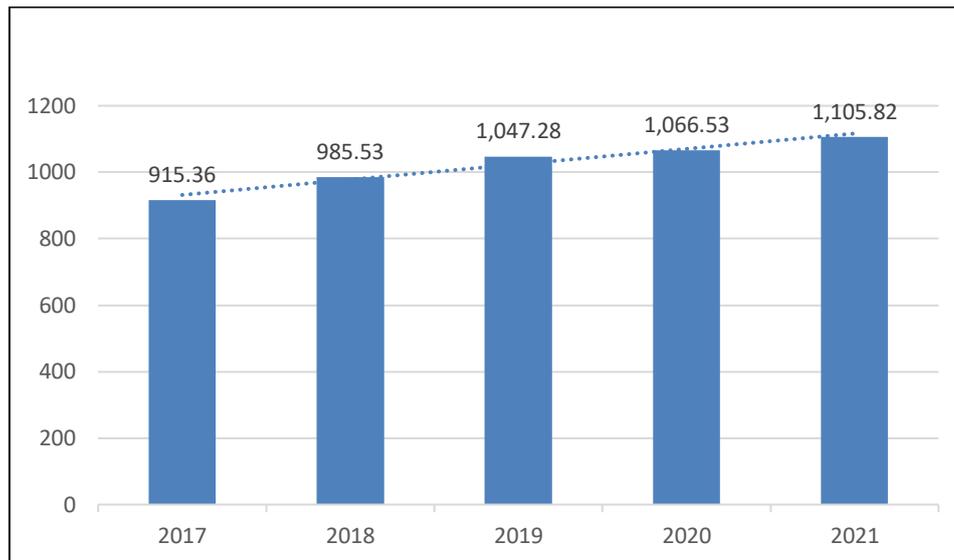


Gambar 3. Data Total dan Rata-Rata PDRB NTB dan KSB 5 Tahun Terakhir
(Sumber. Analisis Data Penelitian, 2022)

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa data rata-rata PDRB Kabupaten Sumbawa Barat dan Prov NTB dapat menjadi perbandingan untuk melihat laju perubahan PDRB Lima Tahun Terakhir. Dari data tersebut diketahui bahwa laju rata-rata 130.792 Kabupaten Sumbawa Barat dan 653.958 Prov NTB Sedangkan Total Dari PDRB Kabupaten Sumbawa Barat 21.009 dan 105.045 Prov NTB. Hal ini dilihat dari berkembangnya PDRB yang tiap tahunnya selalu meningkat merupakan upaya dari pemerintah daerah provinsi NTB yang bertujuan untuk membangun perekonomian NTB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat.

Berikut adalah data total dan rata-rata PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama 5 tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB NTB Tahun 2016: Rp 125,56 triliun, Tahun 2017: Rp 136,14 triliun, Tahun 2018: Rp 146,84 triliun, Tahun 2019: Rp 155,18 triliun, Tahun 2020: Rp 159,59 triliun, Rata-rata PDRB NTB selama 5 tahun terakhir adalah sekitar Rp 144,26 triliun Sedangkan PDRB KSB Tahun 2016: Rp 7,99 triliun, Tahun 2017: Rp 8,36 triliun, Tahun 2018: Rp 9,07 triliun, Tahun 2019: Rp 9,53 triliun, Tahun 2020: Rp 9,96 triliun Rata-rata PDRB KSB selama 5 tahun terakhir adalah sekitar Rp 8,78 triliun.

Dari data tersebut, terlihat bahwa PDRB Provinsi NTB memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam perekonomian dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, PDRB Kabupaten Sumbawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB ini penting untuk membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan untuk daerah-daerah tersebut. Dengan memahami data PDRB, pemerintah dapat menentukan prioritas sektor yang perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur dan sistem perekonomian di daerah tersebut.

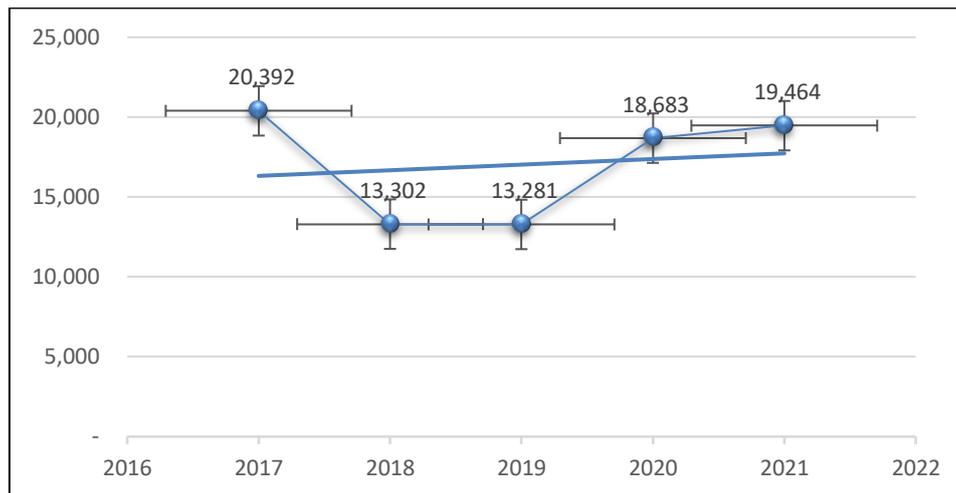


Gambar 4. Data Total Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5 Tahun Terakhir
(Sumber. Analisis Data Penelitian, 2022)

Berikut adalah data total pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016: Rp 1,19 triliun, Tahun 2017: Rp 1,23 triliun, Tahun 2018: Rp 1,36 triliun, Tahun 2019: Rp 1,41 triliun, Tahun 2020: Rp 1,45 triliun. Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor ini merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat, karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini. Beberapa subsektor yang termasuk dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat juga didukung oleh keindahan alamnya yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari semua sektor yang ada, perkembangan pendapatan asli daerah juga akan berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin bertambahnya pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan hal itu dikarenakan usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah secara merata. Perkembangan pendapatan asli daerah per kabupaten/kota tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut biasa dilihat di tabel 4.5 dibawah ini, tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB dari tahun 2011-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah per kabupaten/kota hingga 10 persen. Tiap-tiap kabupaten/kota pertumbuhan pendapatan asli daerahnya tidak selalu sama hal itu disebabkan oleh sektor-sektor yang berperan dalam perkembangan pendapatan asli daerah tidak bekerja secara maksimal yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti pembangunan infrastruktur ekonomi yang belum merata.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kabupaten/kota jika dilihat dari tahun yang tertinggi yaitu di tahun 2016 dan kabupaten/kota yang tertinggi adalah kabupaten Lombok timur dan diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Timur merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi di Provinsi NTB hal itu berdampak pada pendapatan asli daerahnya yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi NTB. Perkembangan pendapatan asli daerah yang terendah berada di tahun 2011, di tahun 2011 perkembangan pendapatan asli daerah tiap kabupaten/kota tidak terlalu mengalami tren yang tiap-tiap kabupaten/kota perkembangan pendapatan asli daerah hampir sama.



Gambar 5. Data Total Pertambangan dan Penggalian 5 Tahun Terakhir
(Sumber. Analisis Data Penelitian, 2022)

Berikut adalah data total pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016: Rp 1,28 triliun, Tahun 2017: Rp 1,34 triliun, Tahun 2018: Rp 1,39 triliun, Tahun 2019: Rp 1,43 triliun, Tahun 2020: Rp 1,49 triliun. Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor ini merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat, karena daerah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Beberapa jenis kegiatan yang termasuk dalam sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain pertambangan bijih besi, emas, tembaga, dan seng, serta tambang pasir besi. Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat juga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Data PDRB sektor pertambangan dan penggalian ini penting untuk membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan untuk daerah tersebut. Dengan memahami data PDRB sektor pertambangan dan penggalian, pemerintah dapat menentukan prioritas sektor yang perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur dan sistem perekonomian di daerah tersebut.



Gambar 6. Data Total PDRB Sumbawa Barat Lainnya 5 Tahun Terakhir
(Sumber. Analisis Data Penelitian, 2022)

Berikut adalah data Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016: Rp 8,74 triliun, Tahun 2017: Rp 9,53 triliun, Tahun 2018: Rp 10,53 triliun, Tahun 2019: Rp 11,42 triliun, Tahun 2020: Rp 11,75 triliun. Dari data tersebut, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Sumbawa Barat mengalami

peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat terus berkembang. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sumbawa Barat di pengaruhi oleh beberapa sektor seperti sektor Perdagangan besar dan eceran, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor pendidikan, sektor keuangan atau asuransi, sektor industri dan sektor-sektor lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Berikut adalah beberapa informasi mengenai persebaran PDRB Kabupaten Sumbawa Barat: PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar Rp 5,57 triliun, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 4,49 triliun., Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 4,68% dibandingkan tahun sebelumnya, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 24,15%, Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 22,98%, Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 10,17%, Kontribusi sektor jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 9,11%. Persebaran PDRB Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam menghasilkan perekonomian daerah tersebut. Namun, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memperkuat sektor-sektor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa PDRB Sumbawa Barat mencapai 14,12 triliun rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 34,99%. PDRB per kapita di Sumbawa Barat pada tahun 2021 mencapai 27,4 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,95%. Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 9,15%. Secara geografis, kecamatan Taliwang menjadi daerah dengan kontribusi PDRB terbesar, yaitu sebesar 29,58%. Diikuti oleh Kecamatan Brang Rea sebesar 23,79%. Sementara itu, kontribusi terendah berasal dari Kecamatan Jereweh, yaitu sebesar 0,24%. Dalam beberapa tahun terakhir, Sumbawa Barat mengalami peningkatan kinerja ekonomi yang cukup signifikan. Peningkatan ini didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor andalan. Namun, masih diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan, E., & Sudyasjayanti, C. (2020). The importance of customer trust toward ewom on customer behavior: The case of generation Y in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 13(2), 213-226.
- Chaniago, N. (2014). Analisa Struktur Pasar Dan Efisiensi Industri Perbankan Di Indonesia Periode 2007-2012. *Media Ekonomi Universitas Trisakti*, 27-52.
- Christine, D., Wijaya, J., Chandra, K., Pratiwi, M., Lubis, M. S., & Nasution, I. A. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, total arus kas dan ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan property dan real estate yang terdapat di bursa efek indonesia tahun 2014-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 340-350.
- Dito, S. B., & Pujiastuti, H. (2021). Dampak revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan: kajian literatur mengenai digital learning pada pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, 4(2), 59-65.
- Esmara, H. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fedora, S. D., & Hudiyono, R. F. (2019). Analisis pemangku kepentingan (stakeholder) pada unit hubungan masyarakat (Humas) dan kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis*

Terapan (JABT), 2(1), 6.

- Hasanah, S., Pratama, I. N., & Kurniawan, C. (2023). Digital Government in Social Sciences Discipline: Mapping Pivotal Features and Proposed Theoretical Model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 195-220.
- Kadarsih, S., Bayuardi, G., & Equanty, D. (2020). Identifikasi Kesiapan Masyarakat Dusun Mulia Menuju Desa Mandiri Tahun 2019 (Studi Kasus Dusun Mulia Desa Persiapan Permata Jaya). *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 37-51.
- Karim, A., & Setiawan. (2017). Pemodelan Pdrb Sektor Industri di SWP Gerbangkertasusila dan Malang- Pemodelan Pdrb Sektor Industri D I SWP Gerbangkertasusila dan Malang-Pasuruan Dengan Pendekatan Spatial Durbin Error Model (SDEM). *Conference: Seminar Nasional Matematika Universitas Negeri Surabaya*.
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186-191.
- Mahdalena, S., Saputra, I., & Usman, S. (2020). Analisis Hubungan Penerapan Konsep Pelayanan Kesehatan Berbasis Islami dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUDZA. *Jurnal Penelitian Kesehatan "Suara Forikes"(Journal of Health Research" Forikes Voice")*, 12, 93-98.
- Millis, K., Magliano, J., & Todaro, S. (2006). Measuring discourse-level processes with verbal protocols and latent semantic analysis. *Scientific Studies of Reading*, 10(3), 225-240.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101-112.
- Nugraha, A., Sudyana, I. R., Judawinata, M. G., & Kurnia, G. (2017). Dinamika sosial kaji tindak pembangunan sistem pertanian berkelanjutan, terintegrasi dan mandiri energi (studi kasus di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut). *Pembina (Advisors)*, 340.
- Nursan, M., & Sukarne, S. (2021). Strategi Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Pertanian Cemara*, 18(2), 21-32.
- Octavia, A., Zulfanetti, Z., & Erida, E. (2017). Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kinerja bisnis usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 155-166.
- Ratih Sulistyastuti, D. (2001). Ekonomi Pembangunan Dinamika Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Analisis Konsentrasi Regional Ukm Di Indonesia 1999-2001. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2006). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin-Impact of Economic Growth on The Reduction of Poor People. *Direktur Kajian Ekonomi: Institusi Pertanian Bogor*, 1-18.
- Sugiono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, E., Silvaggi, M., Aversa, F., Rossi, V., Nimbi, F. M., Rossi, R., & Simonelli, C. (2018). Are Social Media a problem or a tool? New strategies for sexual education. *Sexologies*, 27(3), e67-e70.
- Yamani, M. (2011). Strategi perlindungan hutan berbasis hukum lokal di enam komunitas adat daerah bengkulu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 175-192.
- Yy, N. A., & Antomi, Y. (2020). Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Produk Domesti Regional Bruto di Kota Padang Panjang dan Bukittinggi Tahun 2014-2018. *Jurnal Buana Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial*, 4(5), 2615-2630.